

PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) (Suatu Studi di Kecamatan Bunaken Kota Manado)

Parlan Pangumpia¹

Ronny Gosal²

Sofia Pangemanan³

Abstrak

Dwifungsi TNI telah lama dihapuskan namun bukan berarti peran TNI memberdayakan kesejahteraan masyarakat telah ditinggalkan, melalui program TNI Manunggal Membangun Desa membantu percepatan pembangunan daerah tertinggal, dimana program ini dilaksanakan sebagai upaya membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan membantu tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa di Kecamatan Bunaken Kota Manado, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian dari pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa telah sesuai dengan target yang direncanakan bahkan mencapai over prestasi. Pelaksanaan TMMD selain membantu pemerintah dalam pembangunan juga dapat menghemat anggaran karena TNI yang bekerja langsung bersama-sama dengan rakyat, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa juga dapat mempererat hubungan TNI dengan rakyat dan menghapus kesan takut pada masyarakat tentang sosok seorang prajurit TNI, serta mempererat kerja sama TNI dengan pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Tentara Nasional Indonesia, Pembangunan, Program Tentara Manunggal Membangun Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Sebagai sebuah institusi, TNI mempunyai sumber daya dan kapasitas. Kapasitas TNI sebagai komoditas pertahanan negara sudah banyak dibahas. TNI sebagai pertahanan negara ternyata mempunyai peran terhadap pembangunan nasional. Bentuk dari peran TNI tersebut dapat dilihat dari Bhakti TNI. Bhakti TNI adalah pendayagunaan kemampuan TNI terhadap objek yang bersifat fisik material maupun mental spiritual dalam rangka menunjang pembangunan negara dan bangsa, tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapan nasional. Kegiatan bhakti TNI yang dilaksanakan oleh prajurit dan satuan TNI, bersifat membantu, terintegrasi dan selalu terarah pada usaha penyuksesan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah didukung oleh seluruh Departemen, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Optimalisasi peran TNI sama sekali bukan bentuk ekspansi TNI seperti dimasa lalu untuk mencampuri atau mengambil alih peran dan tugas pokok institusi lain. Optimalisasi peran TNI semata-mata panggilan moral atau peran fungsi TNI untuk menunaikan tugas perbantuan TNI kepada institusi atau lembaga lain seperti pemerintah daerah apabila diperlukan sesuai dengan batas kemampuan TNI. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan partisipasi aktif dan kontribusi nyata TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pokok yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, membantu menegakkan disiplin, tata tertib dan hukum serta membantu meningkatkan citra bangsa Indonesia

dimata dunia melalui kerjasama Internasional dibawah naungan bendera PBB.

Kegiatan TMMD sarasannya adalah pembangunan fisik dan nonfisik, terutama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah, seperti jalan, rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain. Contoh pembangunan non fisik antara lain seperti penyuluhan-penyuluhan, pemberantasan narkoba dan penyakit sosial masyarakat, peningkatan sarana dan mutu pendidikan, modernisasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan revitalisasi agrobisnis, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), meningkatkan ekonomi nelayan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sasaran non fisik, diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat desa guna meningkatkan kualitas hidup dalam membangun daerahnya sendiri menuju kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri.

Sampai sejauh ini masyarakat dapat merasakan dampak dari dilaksanakannya TMMD, namun harus diakui bahwa pelaksanaan TMMD belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tanpa melalui hambatan, baik yang datang dari internal seperti koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, maupun eksternal seperti dukungan dan partisipasi masyarakat. Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Bunaken Kota Manado, secara umum TMMD yang dilaksanakan di beberapa desa dapat dikatakan berhasil, namun ada juga beberapa permasalahan yang terjadi seperti koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, hal ini diakibatkan oleh berbedanya garis

komando tersebut, dimana TNI secara teritorial berada di bawah garis komando Komando Resimen Militer (Korem 131 Santiago) sedangkan pemerintah daerah berada di bawah garis komando bupati.

Tinjauan Pustaka

Penggunaan kata pembangunan telah dipopulerkan oleh para sarjana dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat, dan diperkenalkan ke Eropa Barat dan negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang. Pembangunan berasal dari kata development. Kata development ini diartikan sebagai pembangunan atau perkembangan dan perubahan sosial. Menurut Nasution (2008:43) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan rumusan di atas, penulis akan mengemukakan beberapa teori atau pendapat, ataupun gagasan yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini.

Pembangunan menurut Alexander (dalam Nasution, 2008:44) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson (dalam Nasution, 2008:45) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju

arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) tentang Tugas Pokok TNI dinyatakan bahwa salah satu dari tugas pokok TNI selain perang yaitu membantu tugas dari pemerintahan daerah. Maksud dari membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

Sarana yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Salah satu sarana yang dimiliki oleh TNI adalah adanya rumah sakit TNI yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI tetapi dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat lain. Apabila terjadi bencana di suatu daerah, maka rumah sakit tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk menolong korban bencana alam dan tenaga medis yang ada akan siap membantu. Selain itu sarana lain yang dimiliki oleh TNI dalam hal ini dapat dilihat dari adanya Koramil (Komando Rayon Militer) di setiap di daerah tingkat kecamatan atau posko-posko yang dibangun oleh TNI. Adapun kegunaan dari sarana tersebut yaitu apabila terjadi bencana alam atau konflik, maka tempat tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi untuk menyimpan bantuan berupa makanan,

pakaian, obat-obatan atau bantuan lainnya yang diperlukan.

Alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal membantu pemerintah daerah, TNI mempunyai sejumlah peralatan yang dapat digunakan apabila diperlukan oleh pemerintah daerah. Adapun alat-alat yang dapat digunakan tersebut antara lain truk, pesawat, helikopter, ambulans, kapal, dll. Apabila terjadi bencana di suatu daerah, maka peralatan yang dimiliki oleh TNI tersebut sangat diperlukan, misalnya truk TNI dapat digunakan untuk mengevakuasi warga, Pesawat, helikopter, ataupun kapal dapat digunakan untuk mengirimkan bantuan dan evakuasi korban ke daerah yang sulit dijangkau. Begitu juga dengan ambulans TNI dapat digunakan untuk mengevakuasi korban.

Dari segi kemampuan yang dimiliki oleh TNI dalam membantu pemerintah daerah adalah segenap kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh TNI. Kemampuan ini menuntut keprofesionalitasan seorang anggota TNI. Seorang anggota TNI tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan senjata atau dalam bidang pertahanan, tetapi ia juga memiliki kemampuan lain yang dapat digunakan bagi kegiatan operasi selain perang. Apabila terjadi konflik atau separatis di daerah, maka dengan segenap kemampuan yang di milikinya, maka TNI akan berupaya untuk menghentikan konflik tersebut. Kemampuan TNI yang juga dimilikinya adalah dari segi kesehatan. Dalam TNI sendiri tersedia tenaga kesehatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Tidak jarang tim kesehatan ini diturunkan di daerah konflik maupun bencana. Bahkan salah satu Batalyon

yang dimiliki oleh TNI yaitu Batalyon Zeni Tempur memiliki kemampuan khusus, di mana anggotanya memiliki kemampuan dalam membangun konstruksi jalan, jembatan, perumahan, dll. Kemampuan TNI ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan daerah.

Apabila pemerintah daerah sedang menghadapi masalah seperti bencana alam, kerusakan infra struktur yang diakibatkan oleh bencana alam, maupun pemogokan dan konflik komunal, maka TNI dapat turut serta ikut membantu pemerintah daerah menyelesaikan masalah tersebut. Apabila terjadi bencana alam maka keterlibatan TNI dalam mengatasi bencana alam yaitu apabila oleh pemerintah daerah baik di tingkat Gubernur/Bupati/Walikota secara lisan menyampaikan permohonan permintaan bantuan kekuatan TNI kepada Pangdam/Danrem/Dandim/Danyon sesuai stuktur jabatan dan tataran kewenangan di daerah yang terkena bencana, setelah diikuti permohonan permintaan secara tertulis.

Begitu juga dalam menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana yaitu kerusakan infra struktur, maka TNI turut serta dalam merehabilitasi berbagai infra struktur yang rusak dengan kemampuan dan peralatan yang dimiliki. Dan apabila terjadi konflik komunal di suatu daerah, misalnya adanya sengketa mengenai batas wilayah yang tidak jelas diakibatkan oleh adanya pemekaran daerah, maka TNI melalui Jawatan Topografi (Jantop) dapat membantu menyelesaikan dengan cara menggunakan peta milik TNI. Begitu juga apabila terjadi pemogokan, TNI beserta pemerintah setempat

bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan bentuk deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran TNI dalam pembangunan daerah melalui kegiatan TMMD di Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Penelitian kualitatif tidak bermaksud membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, (1) informan kunci (Key Informant), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dan (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka ditentukan sejumlah informan dengan menggunakan teknik purposive yaitu, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan yang terdiri dari :

1. Informan Kunci yang terdiri dari :

- a. Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Dim 1302 periode sekarang
 - b. Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Dim 1302 periode pada saat pelaksanaan TMMD Tahun 2010
2. Informan Utama yang terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Kasi Pembangunan Kecamatan Bunaken
 - c. Masyarakat Desa (15 orang)

Hasil Penelitian

Salah satu yang menjadi tugas pokok Kodim 1302 Minahasa adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya. Fungsi teritorial adalah peran militer sebagai institusi ataupun individu yang tidak bersifat tempur (non militer). Fungsi ini diperlihatkan dengan kehadiran militer baik secara institusional maupun individual di berbagai wilayah/daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat yang terendah yakni kelurahan atau desa. Maka untuk menjalankan fungsi teritorial tersebut, keberadaan Kodim 1302 Minahasa ditandai dengan adanya markas Kodim 1302 Minahasa di Tondano, Koramil di tingkat kecamatan, dan pos babinsa di tingkat desa. Keberadaan mereka tidak hanya dapat dilihat dari wujud adanya kantor (markas) di berbagai tingkat wilayah tersebut, tetapi juga oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 1302 Minahasa di setiap daerah yang menjadi wilayah cakupannya.

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) bahwa tugas pokok TNI adalah operasi militer selain perang yang salah satunya membantu tugas pemerintah. Dalam hal ini, Kodim 1302 Minahasa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah

yang ada di wilayah Kodim 1302 Minahasa. Kerja sama tersebut meliputi berbagai kegiatan sesuai dengan alat, kemampuan, dan sarana yang dimiliki oleh Kodim 1302 Minahasa. Salah satu tugas yang dilakukan oleh Kodim 1302 Minahasa dalam membantu pemerintah daerah adalah kegiatan penanggulangan bencana. Wilayah Kodim 1302 Minahasa terletak di daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa, angin puting beliung, di mana bencana tersebut dapat terjadi kapan saja. Dalam hal ini Kodim 1302 Minahasa ikut turut serta dalam hal penanggulangan bencana untuk membantu tugas pemerintah daerah. Sebagai sub kompetemen strategis wilayah, Kodim 1302 Minahasa mempunyai tugas operasi militer selain perang yang diantaranya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2).

Selama tahun 2014 ada beberapa bencana alam yang terjadi di lingkup Kodim 1302 Minahasa, dan untuk menanggulangi bencana tersebut Kodim 1302 Minahasa mempunyai mekanisme dalam penanggulangan bencana tersebut dalam memberikan bantuan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman dan korban bencana sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pelibatan TNI untuk penanggulangan bencana di daerah harus ada permintaan tertulis paling lama 1x24 jam dari pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban TNI maupun pemerintah kepada rakyat. Di sinilah kemampuan, sarana dan alat yang dimiliki oleh Kodim 1302 Minahasa dapat dipergunakan seperti tenda-tenda sebagai tempat pengungsian

korban, anggota Kodim 1302 Minahasa yang membantu dalam pencarian korban, anggota Kodim yang mempunyai kemampuan dalam bidang kesehatan juga dilibatkan untuk membantu korban, dan juga koramil yang ada sebagai posko penanggulangan bencana.

Tidak hanya penanggulangan bencana, Kodim 1302 Minahasa juga bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada dalam kegiatan KB Kes dilaksanakan sebagai upaya dalam membantu pembangunan dibidang kesehatan masyarakat dan bertujuan untuk ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Kegiatan ini dilaksanakan di semua kabuapten dan kota yang ada di wilayah Kodim 1302 Minahasa bekerja sama dengan dinas BKKBN setempat. Bentuk kegiatan ini adalah penyuluhan kesadaran pentingnya kesehatan dan penyuluhan program KB bagi kaum perempuan.

Salah satu yang menjadi agenda rutin di Kodim 1302 Minahasa adalah penyelenggaraan kegiatan karya bhakti untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing koramil setiap bulannya bekerja sama dengan masyarakat untuk membentuk kemandirian TNI dengan rakyat. Kegiatan ini hampir sama dengan TMMD yang sama-sama bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membangun fisik dan non fisik. Namun yang menjadi perbedaan adalah kegiatan TMMD hanya dilaksanakan setahun sekali dengan anggaran yang lebih besar dari karya bhakti serta melibatkan dinas-dinas dan pemerintah daerah. Selain itu ada juga

kegiatan perkemahan dan pramuka Saka Wira Kartika yang dilaksanakan oleh Kodim 1302 Minahasa di beberapa kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kodim 1302. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran bela negara dan wawasan nusantara kepada siswa-siswa SMA sebagai generasi penerus.

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama Kodim 1302 Minahasa dengan pemerintah daerah yang ada serta dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah. Untuk mewujudkan ketahanan wilayah diperlukan wilayah atau daerah yang tangguh dan karena sistem perlawanan kita adalah sistem rakyat semesta yang melibatkan seluruh rakyat, maka diperlukan rakyat yang memiliki kesadaran bernegara serta jiwa yang sehat dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang melakukannya, bagaimana mereka melakukannya, atau di mana pembangunan itu dilakukan. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila dalam suatu negara tidak terjadi gejolak, instabilitas dan gangguan keamanan serta ketertiban umum. Oleh karena itu negara memerlukan ketahanan nasional yang ampuh dan andal. Dengan kemampuan seperti itu, negara yang bersangkutan akan memerlukan angkatan bersenjata yang efektif dan modern untuk menangkali berbagai bentuk ancaman atau bahkan serangan yang mungkin datang dari luar dan untuk memadamkan segala bentuk gangguan yang mungkin timbul di dalam negeri. Dapat dibayangkan jika

suatu negara tidak memiliki angkatan bersenjata yang dapat diandalkan, maka kondisi keamanan dan pertahanan negara juga akan lemah. Hal ini akan memudahkan terjadinya berbagai aksi separatisme, terorisme, kejahatan terorganisasi, dan berbagai gangguan keamanan lainnya. Tentunya hal ini akan berdampak kepada ketidakstabilan kondisi perekonomian, politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Jika kondisi ini terjadi maka pembangunan di suatu negara akan terhambat, bahkan investor dari luar negeri pun enggan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia, bahkan dapat mempengaruhi terhadap nilai tukar mata uang rupiah menjadi rendah.

TNI hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap anggota TNI harus siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui berbagai operasi militer perang telah dilakukan dalam menumpas berbagai gerakan separatis yang pernah ada di Indonesia, yang berusaha menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun masih banyak di antara kita yang belum mengetahui kontribusi TNI dalam pembangunan nasional. Masyarakat lebih mengidentikkan TNI dengan perang, padahal TNI sendiri tidak selamanya selalu berperang dalam membangun negara ini. Ada cara lain yang dilakukan oleh TNI dalam masa damai sebagai bentuk nyata dari kontribusi mereka dalam membangun bangsa. Salah satunya adalah membantu tugas dari pemerintah daerah sesuai

dengan alat, kemampuan, dan sarana yang dimiliki TNI. Bersama pemerintah daerah mereka melakukan kerja sama dalam hal pembangunan daerah, tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga non fisik. TNI juga memiliki program-program yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan tanpa mengabaikan kewaspadaan dan Hankamnas. Hal inilah yang perlu kita ketahui bersama sehingga dapat mengubah pandangan kita tentang sosok TNI yang menakutkan.

Tidak hanya melakukan kegiatan melalui program mereka yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi TNI juga perlu dilibatkan dalam hal perencanaan pembangunan, hal ini terkait dengan pertahanan dan keamanan wilayah. Selama ini TNI memang diundang untuk menghadiri rapat perencanaan tetapi kontribusi mereka belum terlihat karena dari hasil wawancara penulis, mereka hanya diundang untuk mendengar rencana pembangunan. Selama ini pembangunan hanya dilihat dari aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan, pembangunan dikatakan berhasil apabila tingkat ekonomi meningkat. Sistem perencanaan pembangunan kita saat ini lebih menekankan pada sistem bottom up, dari bawah ke atas. Dimulai dari tingkat desa untuk seterusnya dilanjutkan dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Desa sebagai salah satu basis pembangunan juga harus memiliki perencanaan yang juga memperhatikan aspek pertahanan keamanan. Desa sebagai lumbuk pangan harus tetap dipertahankan. Jangan sampai karena keegoisan beberapa pihak yang mempunyai banyak uang, maka tempat

yang tadinya merupakan daerah persawahan kini dirumah menjadi perumahan atau desa lebih banyak ditanami sawit dan karet. Dari segi ketahanan pangan maka ini akan mengancam, akibatnya kita harus mengimpor beras dari luar negeri. Apabila lagi pembalakan liar, dimana hutan-hutan banyak yang digunduli. Bukan hanya sebagai habitat beranekaragam hewan, tetapi kegunaan hutan juga dapat digunakan sebagai rintangan alam. Apabila terjadi perang, maka tank-tank musuh akan kesulitan melintas, tetapi jika hutan-hutan kita sudah gundul maka akan mudah untuk melewatinya. Perlunya pengetahuan bela negara dan wawasan nusantara bagi masyarakat pedesaan yaitu agar mereka tahu bahwa membela negara bukan hanya tugas dari TNI tapi seluruh rakyat Indonesia. Itulah gunanya dilakukan penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen. Maka jika terjadi perang maka masyarakat juga membantu.

Di setiap desa sendiri ditempatkan Babinsa (Bintara Pembinaan Desa) dimana ia harus berinteraksi dengan masyarakat desa setempat, mengetahui segala kondisi desa, dan melaporkan setiap ada kejadian yang terjadi di desa tersebut. oleh karena itu sangat penting memperhatikan faktor pertahanan bagi pembangunan karena pembangunan hanya akan berjalan jika suatu negara dalam keadaan aman. Dalam Pembangunan Nasional, orientasinya diarahkan kepada kepentingan rakyat banyak, dan pada umumnya rakyat Indonesia lebih banyak bermukim di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sebagai bagian

integral dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang strategis. Dengan pembangunan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat desa sebagai sumber kekuatan dalam melaksanakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Keberhasilan pembangunan desa berarti meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan yang hasil-hasilnya akan menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat terjadi perang juga tentunya akan membutuhkan beras sebagai bahan makanan. Bisa-bisa prajurit mati bukan karena berperang tetapi karena kelaparan. Belum Indonesia. Desa secara keseluruhan merupakan basis Ketahanan Nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 84 wilayah Kodim 1302 Minahasa dilaksanakan Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tersebut mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain:

- a) Meningkatkan motivasi masyarakat Kecamatan Wori dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak hanya didominasi TNI, tetapi kegiatan ini adalah kegiatan yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah daerah, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, serta masyarakat. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, TNI mengajukan kepada pemerintah setempat bahwa mereka akan melaksanakan kegiatan TMMD. Kemudian pemerintah daerah memerintahkan kepada Dinas PU untuk mengecek kondisi di lapangan untuk

memperkirakan. Oleh pemerintah setempat kegiatan ini disetujui dan masuk sebagai salah satu program pembangunan dan pemerintah daerah setempat kemudiana menganggarkan dana dari APBD untuk membiayai kegiatan tersebut.

Sebagai salah satu program kegiatan pemerintah yang bekerja sama dengan TNI maka masyarakat juga dituntut untuk ikut terlibat langsung, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi subyek dari pembangunan daerah. Pelaksanaan TMMD ini didasarkan akan kebutuhan masyarakat desa setempat. Apa yang mereka butuhkan itulah yang dilaksanakan karena program ini bersifat bottom up, dimana sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah di tingkat desa untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program TMMD juga bertujuan untuk mempererat hubungan TNI-rakyat karena TNI lahir dari perjuangan rakyat.

Dalam pelaksanaan TMMD, masyarakat bersama TNI bekerja sama membangun desa mereka. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat dan Kapt. Inf. Erasmus Purba bahwa selama pelaksanaan TMMD masyarakat Kecamatan Wori masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan TMMD bersama TNI membuka jalan, jembatan dan parit. Mereka datang dengan sukarela dan membawa peralatan masing-masing untuk mempermudah pekerjaan. Tidak hanya kaum pria, para ibu-ibu juga ikut terlibat bekerja sama dengan TNI membangun Desa.

Tidak hanya selama pelaksanaan TMMD, setelah kegiatan TMMD selesai masyarakat turut merawat hasil dari pembangunan TMMD namun beberapa hasil TMMD seperti jembatan mulai mengalami kerusakan karena

jembatan itu bersifat darurat. Seperti yang penulis jumpai di lapangan, salah satu jembatan mulai mengalami kerusakan karena hanya terbuat dari papan dan batang pohon kelapa sederhana. Tetapi menurut penuturan masyarakat bahwa dalam waktu terdekat mereka bekerja sama dengan Koramil 10 Wori akan memperbaiki jembatan tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penulis juga melihat ada tumpukan pasir yang menurut masyarakat merupakan hasil swadaya mereka yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki jembatan.

Danramil Wori yang juga mantan Pasiter pada saat TMMD juga menuturkan bahwa baru-baru ini Koramil Wori bersama masyarakat baru saja melakukan pemeliharaan jalan karena mulai berlumpur. Masyarakat meminta bantuan Koramil 10 untuk bersama-sama merawat hasil dari TMMD dan masyarakat bersedia menyediakan bahan-bahannya.

Dengan adanya pembukaan jalan melalui kegiatan TMMD, masyarakat desa tidak hanya dimanjakan dengan hasil-hasil dari pembangunan tersebut. Mereka juga dituntut untuk ikut terlibat langsung membangun desa mereka serta merawat hasil dari pembangun tersebut sehingga mereka benar-benar dapat merasakan hasil dari pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa.

b) Memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat desa

Dengan luas wilayah yang dimiliki pada saat itu menyebabkan pembangunan belum merata. Belum semua daerah dapat merasakan pembangunan sampai ke pelosok desa yang terisolir. Untuk itu pemekaran wilayah dilakukan salah satunya guna untuk lebih mempercepat pembangunan

di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sendiri baru terbentuk belum genap empat tahun. Di usianya tersebut tentunya kabupaten ini masih perlu banyak melakukan kegiatan pembangunan sehingga belum semua daerah dapat merasakannya.

Kondisi kedua desa tersebut sebelum adanya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sangat memprihatinkan. Untuk diketahui bersama bahwa Desa Sigading sendiri telah dua kali mendapat pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa yaitu pada tahun 1995, tetapi pada saat itu kegiatan ini masih bernama Abri Masuk Desa (AMD). Namun karena tidak adanya pemeliharaan dari masyarakat dan pemerintah maka desa tersebut kembali ke kondisi awal hingga pelaksanaan TMMD pada tahun 2010 kemarin. Padahal kedua desa tersebut menyimpan potensi hasil pertanian dan perkebunan seperti karet dan sawit. Namun karena infrastruktur yang sangat minim maka untuk mendistribusikan hasil perkebunan, mereka mengalami kesulitan. Apalagi jika musim hujan tiba, dengan kondisi jalan yang masih berupa tanah merah mereka mengalami kesulitan karena jalanan akan berlumpur. Belum lagi banjir yang terkadang melanda. Seperti yang dituturkan oleh informan warga desa Wori, jika musim hujan tiba jari-jari sepeda motor bisa tidak terlihat lagi. Untuk mengangkut hasil perkebunan mereka harus menggunakan pedati sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan harga kurang dapat bersaing.

Tetapi kini dengan adanya pembukaan jalan, distribusi barang maupun jasa semakin lancar. Seperti yang dituturkan kepala Desa Kima Bajo, bahwa dengan adanya pelaksanaan TNI Manunggal

Membangun Desa di desanya masyarakat semakin mudah untuk membawa hasil perkebunan mereka. Masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu yang lama karena truk seperti colt diesel pun sudah bisa masuk untuk mengangkutnya. Akibatnya sangat berdampak terhadap perekonomian mereka karena harga karet dan sawit mereka kini dapat bersaing. Mereka yang selama ini banyak membawa hasil pertanian mereka ke wilayah perbatasan yang memang lebih dekat, kini telah bisa menjualnya ke daerah lain yang masih di wilayah Minut. Bahkan salah seorang penduduk desa Kima Bajo yang sudah lama merantau kembali ke desanya dan membuka usaha roti. Menurut penuturannya hasil dari usahanya tersebut terbilang sukses. Ia bisa mendistribusikan usahanya tersebut ke desa lain dikarenakan jalan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat sangat menikmati sekali hasil dari pelaksanaan TNI Manunggal Membangun desa ini karena mereka sendiri mengakui bahwa distribusi barang dan jasa jauh lebih baik dari sebelum pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa. Masyarakat tidak begitu kesulitan jika ingin bepergian ke daerah lain, namun pada saat musim hujan saja yang sulit dilalui karena jalan yang terbuat dari tanah merah itu sampai saat ini belum diaspal.

c) Membuka isolasi daerah pedesaan dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi, pendidikan, dan menjalankan roda pemerintahan

Dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ada kriteria tertentu untuk daerah yang akan menjadi tempat pelaksanaan yaitu daerah miskin/tertinggal, terisolir/terpencil, dan daerah perbatasan/pulau-pulau terluar dan

daerah-daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena akibat bencana. Tujuan dari pelaksanaannya yaitu untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut seperti membuka isolasi daerah, memperbaiki sarana fisik, dan untuk mempercepat pembangunan bagi daerah yang terkena akibat bencana. Dengan terbukanya akses jalan dan membaiknya kondisi infrastruktur maka akan berdampak besar terhadap kondisi perekonomian, sosial, serta pemerintahan.

Desa Wori dan Desa Kima Bajo sebelum pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dapat dikategorikan sebagai desa yang terisolir akibat dari buruknya bangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan langsung kedua desa tersebut. Jarak kedua desa tersebut kira-kira 3 km, namun dengan kondisi jalan yang hanya berupa tanah merah dan tidak rata seperti berbukit-bukit ditambah juga dengan kondisi empat jempatan yang sudah tidak layak untuk dilewati membuat kondisi desa sangat memprihatinkan. Belum lagi jika sedang musim hujan tiba, masyarakat akan semakin kesulitan untuk bepergian.

Kesimpulan

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa sesuai dengan target yang direncanakan bahkan mencapai over prestasi. Pelaksanaan TMMD selain membantu pemerintah dalam pembangunan juga dapat menghemat anggaran karena TNI yang bekerja langsung bersama-sama dengan rakyat.
2. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa mempererat hubungan TNI dengan rakyat dan

- menghapus kesan “takut” pada masyarakat tentang sosok seorang prajurit TNI, serta mempererat kerja sama TNI dengan pemerintah daerah.
3. Sampai saat ini belum ada tanggapan yang sangat berarti dari pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pembangunan TMMD sebagai mana yang dinyatakan pada penutupan TMMD bahwa hasil TMMD diserahkan ke pemerintah daerah untuk dirawat dan dilanjutkan pembangunannya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat tercapai apabila suatu negara dalam kondisi stabil, tidak ada gejolak. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan perlu memperhatikan aspek pertahanan agar pembangunan tersebut dapat dicapai.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk merawat dan melanjutkan pembangunan hasil dari kegiatan TMMD agar tidak sia-sia begitu saja.
2. Terus meningkatkan kegiatan pembangunan di kabupaten Minahasa Utara demi kesejahteraan rakyat.
3. Menjalinkan kerja sama dengan TNI dalam kegiatan pembangunan daerah.
4. Serta melibatkan TNI dalam perencanaan pembangunan daerah demi pertahanan dan ketahanan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Buletin Teritorial. Edisi No. 03 Tahun 2004. Jakarta: Staf Umum Teritorial Angkatan Darat.
- Buku Rencana Kegiatan TMMD ke-84 T.A 2010 di Wilayah Kodim 1302.
- Buku Laporan Hasil Kegiatan TMMD ke-84 T.A 2010 di Wilayah Kodim 1302.
- Buku Rencana Umum TNI Manunggal Membangun Desa TA.2010. Buku I, II dan IV.
- Jayadinata, Johara. T dan Pramandika I.G.T. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB
- Ketaren, Nurlela, 2009. *Administrasi Pembangunan*. Medan
- Nasution M. Arifin. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan: Fisip Usu Press.
- Nugroho, Riant. D. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Partogi, Poltak Nainggolan. 2007. *Komando Teritorial dan Budaya Politik TNI Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI.
- Samego, Indria. 2000. *TNI di Era Perubahan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- TNI abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa. 2001. Jakarta: Mabes TNI.
- Todaro, Michael.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.